

## **DIVERSITAS SOSIOKULTURAL DALAM PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DAN GENDER**

**SITI OSA KOSASSY, S.Sos., M.Si.**

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) LPPN

Padang, Sumatera Barat

E-mail: sitiosakosassy@gmail.com

### **ABSTRACT**

*Indonesia is a pluralistic country that there are various tribes from Sabang to Merauke. As a result of this diversity conflicts often occur that are horizontal, such as the conflict in Poso, Sampit conflict, ethnic violence in China in 1998 and various other conflicts that resulted in deaths. Besides pluralism in Indonesia, there are also shades of the gender differences between men and women in various ways, such as education, the working world and others. to solve it is necessary for multicultural education and gender. Multicultural education as a new paradigm that was born in the late twentieth century had a vision and a program to prepare young people to face the global world community in a multicultural frame. Multicultural education as a program designed based on the dimensions: content integration, knowledge construction, prejudice reduction, equitable pedagogy, and empowering school culture and social structure. So, the school must teach how multicultural education and gender to eliminate all the differences that occur in the community and make life full of peace and tolerance.*

**Keywords:** *diversity, education, multicultural, gender.*

### **A. PENDAHULUAN**

Berdasarkan arti kata, “diversitas” mempunyai arti perbedaan, kelainan dan keragaman. Sementara itu “sosiokultural” berarti segi sosial dan budaya masyarakat. Jadi diversitas sosiokultural secara makna kata dapat diartikan dengan perbedaan-perbedaan yang terdapat di dalam masyarakat, khususnya mengenai sosial dan budaya masyarakat.

Dalam perspektif pendidikan, diversitas sosiokultural sangat menarik untuk dikaji. Sebab, kebhinekaan yang terdapat dalam masyarakat merupakan

potensi yang luar biasa untuk pelaksanaan pembangunan, namun seiring dengan itu juga sebuah “gunung es” yang sewaktu-waktu akan bisa meledak dan memicu konflik horizontal yang akan menceraiberaikan tatanan kehidupan sosial masyarakat. Kekerasan pada etnis Cina di Jakarta pada bulan Mei 1998, perang antaragama di Maluku Utara pada tahun 1999-2003 dan Poso, perang etnis antara suku Dayak dan Madura tahun 2000, telah menyebabkan kurang lebih 2.000 nyawa melayang sia-sia. Itu beberapa contoh kongkrit masalah yang dihadapi Indonesia seka-

rang ini, di samping masalah korupsi, kolusi, nepotisme, premanisme, perseteruan politik, kemiskinan, kekerasan, separatisme, pengrusakan lingkungan dan hilangnya rasa kemanusiaan untuk selalu menghargai hak-hak orang lain – semua itu adalah bentuk nyata akibat dari diversitas sosiokultural tersebut. Dengan demikian, keragaman ini diakui atau tidak akan menimbulkan berbagai macam persoalan.

Realitas konflik sosial yang seringkali terjadi dengan kekerasan seperti contoh yang disebutkan di atas, akan mengancam persatuan dan eksistensi bangsa. Indonesia dengan jumlah pulau 17.667 (data lain mengatakan 17.504), 11 ribu pulau di antaranya sudah dihuni, dengan jumlah suku sebanyak 359, jumlah bahasa sebanyak 726, populasi penduduk kira-kira 250 juta jiwa dengan agama yang dianut yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu serta berbagai aliran kepercayaan lainnya, seringkali dikatakan Indonesia sebagai negara yang multi-etnis dan multiagama.

Keberagaman ini akan menimbulkan persoalan apabila tidak dikelola dengan baik. Pendidikan multikultural sebagai sebuah konsep, dalam konteks

kebangsaan diarahkan kepada pengembangan pengakuan terhadap keberagaman, perbedaan dan kemajemukan budaya baik ras, suku, etnis dan agama. Konsep yang memberikan pemahaman tanpa adanya diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, kaya atau miskin, mayoritas dan minoritas.

Pada sisi lain, dalam aspek dunia pendidikan, masih terdapat pandangan sebagian masyarakat yang menganggap bahwa suatu tugas atau jabatan akan sukses dipegang oleh perempuan atau pekerjaan itu dimiliki laki-laki. Menyamaratakan dalam segala hal di dalam posisi-posisi yang ada bukanlah sebuah isu emansipasi. Isu gender menyeruak dalam konteks demikian.

Berdasarkan penjelasan di atas, artikel ini membahas tentang diversitas sosiokultural dalam pendidikan multikultural dan gender.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam tulisan ini adalah: (1) Apakah yang dimaksud dengan multikultural? (2) Apakah yang dimaksud dengan pendidikan multikultural? (3) Apakah yang dimaksud dengan gender? (4) Apakah

yang dimaksud dengan pendidikan gender?

### C. TUJUAN PEMBAHASAN

Tujuan pembahasan tulisan ini adalah: (1) Menjelaskan multikultural. (2) Menjelaskan pendidikan multikultural. (3) Menjelaskan gender. (4) Menjelaskan pendidikan gender.

### D. PEMBAHASAN

#### 1. Pengertian Multikultural

Seperti disinggung sebelumnya, berdasarkan arti kata, “diversitas” memiliki arti perbedaan, kelainan dan keragaman. Sementara itu “sosiokultural” berarti segi sosial dan budaya masyarakat. Jadi, diversitas sosiokultural secara makna kata dapat diartikan dengan perbedaan-perbedaan yang terdapat di dalam masyarakat, khususnya tentang sosial dan budaya masyarakat.

Akar kata “multikulturalisme” adalah kebudayaan. Secara etimologis, multikulturalisme dibentuk dari kata “multi” (banyak), “kultur” (budaya) dan “isme” (aliran atau paham). Secara hakiki, dalam kata itu terkandung pengakuan akan martabat manusia yang hidup dalam komunitasnya dengan kebudayaannya masing-masing yang unik. Multikulturalisme berhubungan dengan kebudayaan dan kemungkinan konsep-

nya dibatasi dengan muatan nilai atau memiliki kepentingan tertentu. Jadi, multikulturalisme adalah suatu paham, corak, kegiatan, yang terdiri dari banyak budaya pada suatu daerah tertentu.

Multikulturalisme merupakan lawan dari monokulturalisme yang telah menjadi norma. Multikulturalisme bertentangan dengan monokulturalisme dan asimilasi yang telah menjadi norma dalam paradigma negara-bangsa (*nation-state*) sejak awal abad ke-19. Monokulturalisme menghendaki adanya kesatuan budaya secara normatif [istilah ‘monokultural’ juga dapat digunakan untuk menggambarkan homogenitas yang belum terwujud (*pre-existing homogeneity*)]. Sementara itu, asimilasi adalah timbulnya keinginan untuk bersatu antara dua atau lebih kebudayaan yang berbeda dengan cara mengurangi perbedaan-perbedaan sehingga tercipta sebuah kebudayaan baru.

Multikulturalisme mulai dijadikan kebijakan resmi di negara berbahasa-Inggris (*English-speaking countries*), yang dimulai di Kanada pada tahun 1971. Kebijakan ini kemudian diadopsi oleh sebagian besar anggota Uni Eropa, sebagai kebijakan resmi, dan sebagai konsensus sosial di

antara elite. Dalam perkembangannya, gerakan pendidikan tentang budaya majemuk (*multicultural education*) mencapai puncaknya pada dekade 1970/1980-an, terutama di lembaga-lembaga pendidikan Amerika Serikat. Secara sederhana, multikulturalisme dapat dipahami sebagai sikap bagaimana masing-masing kelompok bersedia untuk menyatu (*integrate*) tanpa memedulikan keragaman budaya yang dimiliki. Mereka semua melebur, sehingga pada akhirnya ada proses “hidridisasi” yang meminta setiap individu untuk tidak menonjolkan perbedaan masing-masing kultur (Nadjamuddin Ramly, 2005:xiv).

Multikulturalisme di Indonesia merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindarkan. Namun, pada kenyataannya, kondisi demikian tidak pula diiringi dengan keadaan sosial yang membaik. Bahkan banyak terjadinya ketidakteraturan dalam kehidupan sosial di Indonesia pada saat ini yang menyebabkan terjadinya berbagai ketegangan dan konflik. Seiring dengan perkembangan zaman yang dipengaruhi oleh adanya globalisasi, banyak terjadi krisis sosial-budaya yang terjadi di masyarakat. Sebagai contoh, merosotnya

penghargaan dan kepatuhan terhadap hukum, etika, moral, dan kesantunan sosial, semakin luasnya penyebaran narkoba dan penyakit-penyakit sosial lainnya.

Oleh karena itu, pendidikan dianggap tempat yang tepat untuk membangun kesadaran multikulturalisme di Indonesia. Melalui pendidikan multikultural diharapkan dapat diwujudkan keteraturan dalam kehidupan sosial-budaya di Indonesia.

## **2. Pendidikan Multikultural**

Secara umum, pendidikan multikultural didefinisikan sebagai sebuah kebijakan sosial yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemeliharaan budaya dan saling memiliki rasa hormat antara seluruh kelompok budaya di dalam masyarakat. Pembelajaran multikultural pada dasarnya merupakan program pendidikan bangsa agar komunitas multikultural dapat berpartisipasi dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang ideal bagi bangsanya (Banks, 1993). Lebih lanjut dikatakan Banks bahwa pendidikan multikultural sebagai pendidikan untuk *people of color*. Artinya, pendidikan multikultural ingin mengeksplorasi perbedaan sebagai keniscayaan (anugerah Tuhan). Kemudian,

bagaimana kita mampu menyikapi perbedaan tersebut dengan penuh toleran dan semangat egaliter.

Adapun Paulo Freire, seorang pakar pendidikan pembebasan, mendefinisikan bahwa pendidikan bukan merupakan “*menara gading*” yang berusaha menjauhi realitas sosial dan budaya. Melainkan pendidikan itu harus mampu menciptakan tatanan masyarakat yang terdidik dan berpendidikan, bukan sebuah masyarakat yang hanya mengagungkan suatu kelas sosial sebagai akibat dari kekayaan dan kemakmuran yang diperolehnya.

Pendidikan multikultural merupakan respons terhadap perkembangan keragaman populasi sekolah, sebagaimana tuntutan persamaan hak bagi setiap kelompok. Hal ini dapat diartikan bahwa pendidikan multikultural adalah pendidikan yang mencakup seluruh siswa tanpa membedakan kelompok-kelompoknya, seperti gender, etnis, ras, budaya, strata sosial, dan agama.

James Bank (dalam Wolfolk, 2009:238-239) menjelaskan, pendidikan multikultural memiliki beberapa dimensi yang saling berkaitan satu dengan yang lain, yaitu: (1) *Content integration*, yaitu mengintegrasikan berbagai

budaya dan kelompok untuk mengilustrasikan konsep dasar, generalisasi, dan teori dalam mata pelajaran/disiplin ilmu. (2) *The knowledge construction process*, yaitu membawa siswa untuk memahami implikasi budaya ke dalam sebuah mata pelajaran. (3) *An equity paedagogy*, yaitu menyesuaikan metode pengajaran dengan cara belajar siswa dalam rangka memfasilitasi prestasi akademik siswa yang beragam baik dari segi ras, budaya, ataupun sosial. (4) *Prejudice reduction*, yaitu mengidentifikasi karakteristik ras siswa dan menentukan metode pengajaran mereka. Kemudian, melatih kelompok untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga, berinteraksi dengan seluruh staf dan siswa yang berbeda etnis dan ras dalam upaya menciptakan budaya akademik yang toleran dan inklusif. (5) *Social structure*, yaitu menelaah kelompok dan praktik-praktik *labeling*, partisipasi olahraga dan interaksi antara staf dan siswa di berbagai garis etnis dan ras untuk menciptakan sebuah budaya sekolah yang memberdayakan siswa dari semua kelompok.

Dari kelima dimensi di atas, menurut Wolfolk, banyak yang hanya familiar dengan dimensi *content inte-*

*gration* (integrasi isi) dengan menggunakan contoh-contoh dan isi dari beragam budaya ketika mengajarkan sebuah subjek. Hal ini dilakukan karena mereka percaya bahwa pendidikan multikultural hanya sebuah perubahan dalam kurikulum semata; sebagian guru berasumsi bahwa hal itu tidak relevan untuk subjek-subjek seperti sains dan matematika. Akan tetapi, jika mempertimbangkan keempat dimensi lainnya, akan membantu siswa memahami bagaimana pengetahuan dipengaruhi oleh berbagai keyakinan, mengurangi prasangka, menciptakan struktur sosial di sekolah yang mendukung pembelajaran dan perkembangan seluruh siswa, dan menggunakan metode-metode pengajaran yang menjangkau seluruh siswa. Bila hal ini dilakukan maka pendidikan multikultural akan relevan dengan semua subjek dan semua siswa.

Pendidikan multikultural akan dapat dilaksanakan dengan baik jika memperhatikan beberapa aspek, yaitu kurikulum multikultural, tenaga pengajar, proses pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran.

*a. Kurikulum multikultural.* Model kurikulum yang dapat digunakan

dalam pendidikan multikultural mencakup kurikulum yang “resmi” dan “*the hidden curriculum*”, yakni kurikulum tidak tertulis dan terencana tetapi proses internalisasi nilai, pengetahuan dan keterampilan justru terjadi di kalangan peserta didik (Tilaar, 2004:45). Lebih lanjut Tilaar mengemukakan bahwa dalam kurikulum “resmi”, pendidikan multikultural sebaiknya diintegrasikan ke semua mata pelajaran dan lintas kurikulum. Oleh karena itu, model kurikulum multikultural harus dapat mengintegrasikan proses pembelajaran nilai, pengetahuan dan keterampilan hidup dalam masyarakat multikultural, seperti keterampilan negosiasi, mengemukakan dan menghadapi perbedaan, resolusi konflik, *cooperative learning and problem solving*.

*b. Tenaga pengajar.* Pengembangan kurikulum dengan pendekatan multikultural haruslah didahului oleh sosialisasi yang baik, agar para guru/tenaga pengajar dapat mengembangkan kurikulum dalam bentuk silabus dan rencana pelajaran, proses belajar di kelas dan evaluasi yang sesuai dengan prinsip multikultural.

*c. Proses pembelajaran.* Proses pembelajaran yang dikembangkan harus

menempatkan peserta didik pada kenyataan sosial di sekitarnya. Artinya, proses belajar yang mengandalkan peserta didik untuk belajar secara kelompok dan bersaing secara kelompok dalam suatu situasi kompetitif yang positif. Dengan cara ini, perbedaan antarindividu dapat sebagai suatu kekuatan kelompok dan peserta didik terbiasa hidup dengan berbagai keragaman budaya, sosial, ekonomi, intelektual dan aspirasi politik.

*d. Evaluasi pembelajaran.* Evaluasi yang digunakan harus meliputi keseluruhan aspek kemampuan dan kepribadian peserta didik sesuai dengan tujuan dan konten yang dikembangkan. Alat evaluasi yang digunakan tidak hanya mengukur hasil belajar (*achievement*), tetapi secara lengkap memberi informasi yang lebih jelas tentang proses pembelajaran.

### **3. Pengertian Gender**

Gender itu berasal dari bahasa Latin "*genus*" yang berarti jenis atau tipe. Gender adalah sifat dan perilaku yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial maupun budaya. Menurut Santrock (2011:194), gender adalah dimensi sosiokultural dan psikologis dari pria

dan wanita. Sementara itu Wolfolk (2009:260) mengemukakan bahwa gender biasanya mengacu pada ciri-sifat dan perilaku yang dinilai tepat untuk laki-laki dan perempuan oleh budaya tertentu. Santrock membedakan istilah gender dengan istilah jenis kelamin (*seks*). Jenis kelamin (*seks*) berhubungan dengan dimensi biologis dari pria dan wanita. Peran gender (*gender role*) adalah ekspektasi sosial yang merumuskan bagaimana pria dan wanita seharusnya berpikir, merasa dan berbuat.

Dalam konsep sosiologi, gender mengacu pada sekumpulan ciri-ciri khas yang dikaitkan dengan jenis kelamin individu (seseorang) dan diarahkan pada peran sosial atau identitasnya dalam masyarakat. WHO memberi batasan gender sebagai "seperangkat peran, perilaku, kegiatan, dan atribut yang dianggap layak bagi laki-laki dan perempuan, yang dikonstruksi secara sosial, dalam suatu masyarakat." Dengan demikian, gender adalah kajian perilaku atau pembagian peran antara laki-laki dan perempuan yang sudah dikonstruksikan atau dibentuk di masyarakat tertentu dan pada masa waktu tertentu pula. Gender ditentukan oleh sosial dan budaya setempat, sedangkan seks adalah

pembagian jenis kelamin yang ditentukan oleh Tuhan. Misalnya laki-laki mempunyai penis, memproduksi sperma dan menghamili, sementara perempuan mengalami menstruasi, bisa mengandung dan melahirkan serta menyusui dan menopause. Bentuk hubungan gender dengan seks (jenis kelamin) adalah sebagai hubungan sosial antara laki-laki dengan perempuan yang bersifat saling membantu atau sebaliknya malah merugikan, serta memiliki banyak perbedaan dan ketidaksetaraan. Hubungan gender berbeda dari waktu ke waktu, dan antara masyarakat satu dengan masyarakat lain, akibat perbedaan suku, agama, status sosial maupun nilai tradisi dan norma yang dianut.

Dari peran ataupun tingkah laku yang diproses pembentukannya di masyarakat itu terjadi pembentukan yang “mengharuskan”, misalnya perempuan itu harus lemah lembut, emosional, cantik, sabar, penyayang, sebagai pengasuh anak, pengurus rumah, dan lainnya. Sedangkan laki-laki harus kuat, rasional, wibawa, perkasa (macho), pencari nafkah, dan lainnya.

Bertolak dari fenomena tersebut, maka konsep penting yang harus

dipahami terlebih dahulu sebelum membicarakan masalah perempuan ini adalah perbedaan antara konsep *seks* (jenis kelamin) dengan konsep *gender*. Pemahaman yang mendalam atas kedua konsep tersebut sangatlah penting. Sebab, kesamaan pengertian (*mutual understanding*) atas kedua kata kunci akan menghindarkan kita dari kemungkinan pemahaman-pemahaman yang keliru dan tumpang tindih antara masalah-masalah perempuan yang muncul lantaran perbedaan akibat *seks* dan masalah-masalah perempuan yang muncul akibat hubungan *gender*. Di samping itu juga untuk memudahkan pemahaman atas konsep *gender* yang merupakan kata dan konsep asing ke dalam konteks Indonesia.

Pemakaian gender dalam wacana feminisme mula pertama dicetuskan oleh Anne Oakley. Perbedaan antara *seks* (jenis kelamin) dan *gender* bahwa: yang pertama (*seks*) berkaitan erat dengan ciri-ciri biologis dan fisik tertentu, kromosom dan genitalia (eksternal maupun internal); sementara yang kedua (identitas *gender*) lebih banyak dibentuk oleh persepsi sosial dan budaya tentang *stereotype* perempuan dan laki-laki dalam sebuah masyarakat.

Karena gender ditentukan secara sosial, maka ideologi dan wawasan suatu masyarakat atau suatu bangsa turut serta membangun gagasan tentang identitas ini (Siti Ruhaini Dzuhayatin, 1996:231).

Pengertian gender secara umum mengacu kepada pemilahan peran sosial atau konstruksi sosial yang membedakan peran antara laki-laki dan perempuan oleh etika budaya setempat yang dikaitkan dengan pandangan kepantasan peran sosial menurut jenis kelamin secara biologis. Pada dasarnya gender hanya merupakan persepsi masyarakat yang mengonstruksikan peran sosial perempuan harus begini dan peran sosial laki-laki harus begitu, sehingga kondisi ini tidak berlaku universal. Peran sosial antara laki-laki dan perempuan untuk kondisi sosial budaya di daerah tertentu bisa berbeda dengan daerah yang lain, bahkan bisa berlaku sebaliknya.

#### **4. Pendidikan Gender**

Beberapa kasus perbedaan gender juga sering terjadi di sekolah. Maka seorang guru harus dapat menghindari sikap-sikap yang mengindikasikan adanya “pembedaan” antara laki-laki dan perempuan. Seorang guru juga harus dapat menjelaskan bahwa tidak ada

perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam hal kesempatan bicara.

Isu gender dalam pendidikan masing-masing berkaitan dengan tiga permasalahan pokok (Ace, dkk., 2010:67), yakni:

*Pertama*, isu gender berkaitan dengan pemerataan kesempatan belajar. Isu gender yang berkaitan dengan pemerataan kesempatan belajar pada setiap jenjang pendidikan yakni: (a) Perolehan kesempatan pendidikan pada awal 1970-an menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan semakin lebar kesenjangan menurut gender. Pola ini berubah pada waktu-waktu terakhir dimana kesenjangan gender paling besar terjadi pada pendidikan dasar dan tinggi tetapi lebih seimbang pada SLTP dan pendidikan menengah. (b) Faktor-faktor yang mempengaruhi kesenjangan gender di SD lebih disebabkan oleh faktor-faktor struktural, yaitu perilaku masyarakat yang dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial budaya dan ekonomi keluarga, yang lebih mementingkan pendidikan anak laki-laki ketimbang anak perempuan.

*Kedua*, isu gender berkaitan dengan proses pengelolaan pendidikan dan pembelajaran. Isu gender berkaitan

dengan permasalahan kesenjangan gender berkaitan dengan proses pengelolaan pendidikan dan pembelajaran adalah: (a) Kurikulum dan buku ajar yang belum berlandaskan pada peran gender secara seimbang akan menyebabkan perempuan tidak mempunyai mentalitas sebagai warga masyarakat yang produktif. (b) Pengaruh sosiokultur masyarakat Indonesia masih menempatkan perempuan dalam posisi yang kurang strategis dalam mengambil keputusan di bidang pendidikan dan pembelajaran. (c) Rendahnya angka partisipasi perempuan dalam pendidikan akan mengakibatkan pendidikan menjadi kurang efisien.

*Ketiga*, isu gender berkaitan dengan pengelompokan siswa atau mahasiswa. Isu gender berkaitan dengan pengelompokan siswa atau mahasiswa dalam bidang kejuruan, jurusan keahlian dan program studi pada pendidikan menengah dan tinggi adalah: (a) Dalam pembagian jurusan dan program studi telah memunculkan gejala pemisahan gender (*gender segregation*) ke dalam bidang keahlian dan pekerjaan yang berlainan. Ini adalah gejala diskriminasi gender secara sukarela (*voluntarily discrimination*).

Hal ini muncul karena kondisi sosiokultur masyarakat terhadap peran-peran gender yang sudah terlembagakan. (b) Penjurusan pada pendidikan menengah dan tinggi menunjukkan masih terdapatnya *stereotype* dalam pendidikan di Indonesia. (c) Terjadinya diskriminasi gender dalam jurusan-jurusan atau program studi tertentu akan mengakibatkan tidak berkembangnya pola persaingan sehat menurut gender. (d) Mentalitas para pengelola dan pelaksana pendidikan yang masih dominan laki-laki cenderung akan mempertahankan kesenjangan gender dalam waktu yang lama.

Berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kesenjangan gender sehubungan dengan kurikulum dan proses pendidikan, dapat dikemukakan sebagai berikut: (a) Partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan pendidikan sangat rendah, karena aspek mereka juga rendah dalam menempati jabatan-jabatan birokrasi pemegang kebijakan. Proporsi kepala sekolah perempuan secara konsisten kecil dibandingkan dengan laki-laki pada setiap jenjang pendidikan. (b) Laki-laki lebih dominan dalam mempengaruhi isi kurikulum sehingga proses pembe-

lajaran cenderung lebih bias laki-laki (*male bias*). Gejala ini dapat diamati dari buku-buku pelajaran yang sebagian besar penulisnya adalah laki-laki. (c) Isi buku pelajaran yang membahas status perempuan dalam masyarakat akan banyak memberikan pengaruh terhadap kesenjangan gender dalam proses pendidikan (Ace Suryadi & Ecep Idris, 2010:159-160).

Langkah-langkah yang harus diperhatikan oleh tenaga pendidik dalam proses belajar mengajar adalah: (a) Mempunyai wawasan yang cukup tentang kesetaraan gender. (b) Sikap dan tindakan antidiskriminasi gender. (c) Sensitif terhadap permasalahan gender.

#### **E. PENUTUP**

Pendidikan di Indonesia yang masyarakatnya terdiri dari berbagai macam ras, suku budaya, bangsa, dan agama dirasa penting untuk menerapkan pendidikan multikultural. Sebab, tidak dapat dipungkiri bahwa dengan masyarakat Indonesia yang beragam inilah seringkali menjadi penyebab munculnya berbagai macam konflik.

Perkembangan zaman dan waktu juga dapat mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga banyak terjadi berbagai macam perubahan

di masyarakat yang diakibatkan oleh masuknya berbagai macam budaya baru dari luar negeri ke Indonesia. Melalui pendidikan multikultural yang memperkenalkan budaya asli kepada peserta didik diharapkan agar peserta didik tidak melupakan budaya asalnya sendiri.

Namun demikian, pendidikan multikultural tidak hanya dipelajari dalam pendidikan normal. Pendidikan multikultural itu juga harus dipelajari oleh masyarakat luas, secara nonformal, melalui berbagai macam diskusi, presentasi, sehingga akan dapat tercipta masyarakat Indonesia yang tenteram dan damai.

Untuk sementara ini, pendidikan multikultural memang kian mendesak untuk dilaksanakan di sekolah. Dengan pendidikan multikultural, sekolah menjadi lahan untuk menghapus prasangka, dan sekaligus untuk melatih dan membangun karakter siswa agar mampu bersikap demokratis, humanis dan pluralis. Ada dua hal yang perlu dilakukan dalam pembangunan pendidikan multikultural di sekolah, yaitu: *Pertama*, melakukan dialog dengan menempatkan setiap peradaban dan kebudayaan yang ada pada posisi sejajar. *Kedua*, me-

ngembangkan toleransi untuk memberikan kesempatan masing-masing kebudayaan saling memahami. Toleransi di sini tidak hanya pada tataran konseptual, melainkan juga pada teknik operasional.

Gender adalah sifat dan perilaku yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial maupun budaya. Dan gender itu sendiri merupakan kajian perilaku atau pembagian peran antara laki-laki dan perempuan yang sudah dikonstruksikan atau dibentuk di masyarakat tertentu dan pada masa waktu tertentu pula. Gender ditentukan oleh sosial dan budaya setempat, sedangkan seks adalah pembagian jenis kelamin yang ditentukan oleh Tuhan. Hal itu perlu selalu disosialisasikan kepada warga masyarakat.

Melalui proses sosialisasi, seseorang akan terwarnai cara berpikir dan kebiasaan-kebiasaan hidupnya. Dengan proses sosialisasi, seseorang diharapkan menjadi tahu bagaimana ia mesti bertindak laku di tengah-tengah masyarakat dan lingkungan budayanya, se-

hingga bisa menjadi manusia yang beradab.

## DAFTAR PUSTAKA

- Banks, J.A. 1993. "Multicultural Education: Historical Development, Dimensions, and Practice". In J.A. Banks & C.A.M. Banks (Eds.). *Handbook of Research on Multicultural Education*. (pp. 3-29). San Francisco: Jossey-Bass.
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini. 1996. *Mem-bincang Feminisme: Gender dalam Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Freire, Paulo. 1984. *Pendidikan sebagai Praktek Pembebasan*. Terjemahan Alois A. Nugroho. Jakarta: Gramedia.
- Ramly, Nadjamuddin. 2005. *Mem-bangun Pendidikan yang Member-dayakan dan Mencerahkan*. Jakarta: Grafindo.
- Santrock, John W. 2008. *Psikologi Pendidikan*. Edisi Kedua. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Suryadi, Ace & Ecep Idris. 2010. *Kese-taraan Gender dalam Bidang Pendidikan*. Bandung: Gene-sindo.
- Tilaar, H.A.R. 2005. *Manifesto Pendidikan Nasional: Tinjauan dari Perspektif Post Modernisme dan Studi Kultural*. Jakarta: Penerbit Kompas.
- Woolfolk, Anita. 2009. *Educational Psychology: Active Learning Edition*. Edisi Kesepuluh. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

✍️ hz